

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar**

##### 1. Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

Prosedur analisis kelayakan pembiayaan merupakan langkah pertama yang dilakukan lembaga keuangan sebelum menyalurkan dananya ke calon anggota. Prosedur analisis kelayakan ini meliputi penilaian terhadap *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Dari kelima penilaian tersebut, yang menjadi pertimbangan KSU Syariah Al Mizan yaitu *character, capacity, capital, dan collateral*, sedangkan *condition of economy* tidak terlalu diperhatikan.

Hasil penelitian di KSU Syariah Al Mizan menunjukkan bahwa pertama, penilaian *character* dilakukan dengan mencari tahu terkait latar belakang calon anggota. Penilaian ini berdasarkan informasi anggota yang berperan sebagai pihak perekomendasi.<sup>184</sup> Kedua, penilaian *capacity* dilakukan dengan menilai usaha yang dijalankan calon anggota melalui tanya jawab terkait penghasilan dan pengeluaran dari usaha tersebut. Selain itu sesekali pihak koperasi juga melakukan pengecekan

---

<sup>184</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

terhadap usaha yang dijalankan anggota.<sup>185</sup> Ketiga, penilaian *capital* dilakukan dengan memperhatikan bahwa modal usaha yang diberikan koperasi digunakan sebagai tambahan modal usaha dan bukan modal utama. Hal ini diterapkan dengan mensyaratkan bahwa usaha yang dijalankan calon anggota setidaknya sudah berjalan 2 tahun. Keempat, penilaian *collateral* dilakukan dengan menyesuaikan antara jumlah pembiayaan dengan nilai jaminan yang mampu diberikan calon anggota. Sedangkan untuk jenis-jenis jaminan yang dapat diserahkan yaitu berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan SHM (Surat Hak Milik). Untuk BPKB sendiri untuk pembiayaan di bawah 10 juta rupiah dan SHM untuk pembiayaan 10 juta atau di atasnya.<sup>186</sup>

## 2. Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan yaitu dengan melakukan penilaian terhadap kelima prinsip yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Dari kelima prinsip tersebut yang menjadi pertimbangan BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo yaitu *character*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economy*. Sedangkan *capital* tidak menjadi pertimbangan lembaga karena pihak lembaga

---

<sup>185</sup> Bapak Heri Prasetyo, Wawancara Administrasi KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

<sup>186</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

bersedia untuk memberikan modal awal kepada calon anggota dengan syarat calon anggota memiliki pengalaman di bidang usaha tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar menunjukkan bahwa pertama, penilaian *character* dilakukan dengan survey kepada orang sekitar calon anggota, dimana pertanyaan terkait survey sendiri sudah terdapat dalam SOP lembaga. Kedua, penilaian *capacity* dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pendapatan anggota guna menyesuaikan dengan jumlah pinjaman yang diajukan.<sup>187</sup> Ketiga, penilaian *collateral* dilakukan dengan menelusuri dan memastikan bahwa jaminan yang diserahkan calon anggota benar milik sendiri atau bukan.<sup>188</sup> Keempat, penilaian *condition of economy* dilakukan dengan melihat tingkat persaingan pasar terkait usaha yang dijalankan calon anggota.<sup>189</sup>

Dari kedua penjabaran diatas dapat diketahui bahwa hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan penilaian *character* digunakan untuk menilai sifat dan watak dari calon anggota.<sup>190</sup> Penilaian *capacity* dilakukan dengan melihat perkembangan usaha dan menilai pengalaman calon anggota terkait bidang usaha yang dijalani.<sup>191</sup> Penilaian *capital* ini berkaitan dengan jumlah modal pribadi milik calon anggota yang digunakan untuk

---

<sup>187</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

<sup>188</sup> Bapak Hisbulloh Huda, Wawancara *Account Officer* BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di Desa Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar), tanggal 11 Mei 2019.

<sup>189</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

<sup>190</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 95.

<sup>191</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 80-82.

menjalankan usahanya.<sup>192</sup> Penilaian *collateral* berfungsi sebagai pengaman pembiayaan dan acuan lembaga menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan. Penilaian *condition of economy* yaitu memperhatikan persaingan pasar pada usaha yang dijalankan calon anggota.<sup>193</sup>

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rafiza Zuliani<sup>194</sup>, Muhammad An'am Azili<sup>195</sup>, Hindayati Mustafidah dan Akbar Wiraisy<sup>196</sup>, Firman Farhani<sup>197</sup> bahwa penelitian ini juga menerapkan analisis kelayakan pembiayaan berdasarkan lima prinsip yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economy*.

## **B. Proses Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar**

### **1. Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses manajemen risiko yang dilakukan KSU Syariah Al Mizan meliputi pertama, pada

---

<sup>192</sup> Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hal 15.

<sup>193</sup> Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 121-124.

<sup>194</sup> Rafiza Zuliani, *Analisis Pengujian Kelayakan Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dalam Mereduksi Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani*, Vol.3 No. 2, (Juli-Desember 2014), hal. 144.

<sup>195</sup> Muhammad An'am Azili, *Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hal. 6.

<sup>196</sup> Hindayati Mustafidah dan Akbar Wiraisy, *Penilaian Kelayakan Peminjaman pada Usaha Kecil Menengah Koperasi Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto*, Vol. 4 No.2, (November 2018), 119.

<sup>197</sup> Firman Farhani, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hal. 6.

proses identifikasi dan pengukuran risiko (pra akad pembiayaan dicairkan) maka pihak lembaga harus memastikan karakter dan kemampuan anggota terkait pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini yang dilakukan lembaga yaitu dengan mempertimbangkan pihak yang akan menerima dananya, dimana KSU Syariah Al Mizan hanya akan menyalurkan dananya kepada anggota yang benar-benar sudah dekat dengan pihak koperasi.<sup>198</sup>

Kedua, pada proses monitoring atau pemantauan risiko (pasca akad pembiayaan dicairkan) maka pihak lembaga memastikan pembiayaan yang diterima anggota berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berkaitan dengan hal ini yang dilakukan KSU Syariah Al Mizan adalah memantau dengan mengingatkan anggota terkait waktu-waktu pembayaran angsuran. Hal tersebut telah dirasa cukup bagi pihak KSU Syariah Al Mizan sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko keterlambatan anggota dalam membayar kewajibannya.<sup>199</sup>

Ketiga, pada proses pengendalian risiko ini berkaitan dengan pengelolaan terhadap risiko. Dalam hal ini yang dilakukan KSU Syariah Al Mizan adalah dengan melakukan penagihan baik secara tertulis maupun mengunjungi langsung anggota terkait serta dengan melakukan *schedule* ulang terhadap kesepakatan pembiayaan terkait.<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

<sup>199</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

<sup>200</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

## 2. Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

Sama hal dengan sebelumnya, proses manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo meliputi pertama, identifikasi dan pengukuran risiko (pra akad pembiayaan dicairkan) dilakukan dengan survey, survey dilakukan dengan memperhatikan SOP serta juga tidak cepat percaya dengan informasi yang disampaikan seseorang yaitu dengan menerapkan asas praduga bersalah.<sup>201</sup> Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang akurat maka survey dilakukan dengan tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan dan survey juga harus dilakukan bukan hanya ke 1 atau 2 orang sekitar, tetapi juga harus lebih.<sup>202</sup>

Kedua, monitoring atau pemantauan risiko (pasca akad pembiayaan dicairkan), pihak BMT UGT Sidogiri mengupayakan bahwa setiap anggota yang memiliki pembiayaan diharapkan memberikan tabungan rutin. Tabungan ini akan diambil oleh karyawan setiap harinya, dan ketika waktu pembayaran angsuran tiba maka tabungan tersebut akan otomatis dikurangi untuk membayar angsuran.<sup>203</sup> Dengan kebijakan seperti ini kiranya dapat menguntungkan kedua belah pihak, dimana anggota akan merasa ringan dalam membayar angsuran dan pihak BMT

---

<sup>201</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

<sup>202</sup> Bapak Hisbulloh Huda, Wawancara *Account Officer* BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di Desa Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar), tanggal 11 Mei 2019.

<sup>203</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

UGT Sidogiri akan memiliki rasa aman ketika angsuran anggota telah terbayarkan.

Ketiga, pengendalian risiko, proses ini kiranya sudah diantisipasi pihak BMT UGT Sidogiri dengan menerapkan kesepakatan terkait nadzar. Nadzar disini akan diberlakukan ketika anggota mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Di dalam nadzar tersebut dijelaskan mengenai apabila seorang anggota mengalami keterlambatan membayar angsuran maka akan dikenai sanksi berikut, dan hal ini sudah tercantum di surat perjanjian.<sup>204</sup> Selanjutnya pihak BMT UGT Sidogiri juga melakukan evaluasi mengenai akad, dimana evaluasi ini berfungsi untuk melihat apakah anggota mengalami permasalahan atau keluhan terkait pembiayaannya, sehingga pihak BMT UGT Sidogiri dapat memberikan solusi secara cepat dan tepat.<sup>205</sup>

Dari penjabaran diatas hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.<sup>206</sup> Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Jureid<sup>207</sup> bahwa penelitian ini juga melakukan proses manajemen risiko melalui proses identifikasi dan pengukuran risiko (pra akad

---

<sup>204</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

<sup>205</sup> Bapak Hisbulloh Huda, Wawancara *Account Officer* BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di Desa Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar), tanggal 11 Mei 2019.

<sup>206</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) .hal. 259.

<sup>207</sup> Jureid, *Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungon)*, Vol. 5 No. 1, (Maret 2016), hal. 103.

pembiayaan dicairkan), proses monitoring atau pemantauan risiko (pasca akad pembiayaan dicairkan), dan proses pengendalian risiko.

### **C. Kendala dalam Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar**

#### **1. Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar**

##### **a. Kendala Eksternal**

Pertama, informasi dari pihak perkomendasi kurang akurat. Seperti yang telah diketahui bahwa pihak KSU Syariah Al Mizan sangat mengandalkan informasi dari anggota yang berperan sebagai perkomendasi, maka kendala yang terjadi yaitu terdapat perkomendasi yang menyampaikan informasi dengan tidak benar.<sup>208</sup> Hal ini biasanya dilatarbelakangi hubungan pertemanan sehingga anggota tersebut berniat membantu dengan harapan ketika pihak lembaga menilai baik karakter seseorang maka pembiayaan yang diajukan tersebut dapat dicairkan.

Kedua, rendahnya pengetahuan calon anggota terkait pelaporan hasil usaha. Dikarenakan pada akad mudharabah semua pengelolaan usaha berada di tangan calon anggota maka diharuskan untuk melaporkan hasil usahanya kepada pihak lembaga. Akan tetapi

---

<sup>208</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.



dengan rendahnya pengetahuan calon anggota maka dalam hal pelaporan hasil usaha kiranya menjadi beban tersendiri bagi calon anggota.<sup>209</sup> Untuk anggota yang baik, hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri karena takut terjadi hal yang dapat dikatakan tidak adil.

b. Kendala Internal

Kendala yang terjadi yaitu kurangnya sumber daya manusia untuk pengawasan. Karena berkaitan dengan usaha yang dijalankan calon anggota, guna keamanan maka sebaiknya dilakukan pengawasan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh pihak KSU Syariah Al Mizan. Pihak lembaga menyampaikan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia sehingga belum bisa melakukan pengawasan tersebut, dan sampai saat ini pihak lembaga hanya dapat mengandalkan kejujuran dari anggota itu sendiri.<sup>210</sup>

2. Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

a. Kendala Eksternal

Pertama, adanya informan yang tidak objektif. Pertimbangan utama BMT UGT Sidogiri dalam menyalurkan dananya yaitu melalui hasil survey, dimana survey tersebut menuntut pihak lembaga untuk berhubungan dengan orang-orang sekitar yang berkaitan dengan calon

---

<sup>209</sup> Bapak Aminudin Syuhada, Wawancara Anggota KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di Jalan Bali, Karangtengah, Kota Blitar), tanggal 10 Mei 2019.

<sup>210</sup> Bapak Heri Prasetyo, Wawancara Administrasi KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 15 Juli 2019.

anggotanya. Melalui survey tersebut akan diperoleh informasi terkait calon anggota, dengan begitu terdapat kemungkinan pihak lembaga akan memperoleh informasi yang tidak benar. Misalkan ketika suatu kelompok memiliki masalah dengan seseorang maka ketika menerima pertanyaan terkait orang yang bersangkutan, terdapat kemungkinan kelompok tersebut hanya menyampaikan keburukan orang yang bersangkutan. Akhirnya pihak lembaga akan terpengaruh informasi dari kelompok tersebut tanpa mengetahui yang sebenarnya terjadi.<sup>211</sup>

Kedua, rendahnya pengetahuan calon anggota terkait akad. Hal yang menjadi dasar disepakatinya perjanjian adalah akad, sedangkan masyarakat awam kurang memahami. Jadi pihak lembaga harus mampu menjelaskan kepada calon anggota bahkan dengan menggunakan kalimat yang dapat diterima oleh masyarakat awam. Karena apabila pihak lembaga tidak bisa menyesuaikan, tentu malah akan menyulitkan.<sup>212</sup> Hal ini terjadi ketika salah seorang anggota ditanya terkait akad yang telah disepakati dengan lembaga, maka yang disampaikan adalah sistemnya bukan jenis akadnya.<sup>213</sup>

#### b. Kendala Internal

Kendala yang terjadi adalah sumber daya manusia masih terbatas. Dengan kendala sumber daya manusia yang terbatas ini maka

---

<sup>211</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

<sup>212</sup> Bapak Hisbulloh Huda, Wawancara *Account Officer* BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di Desa Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar), tanggal 11 Mei 2019.

<sup>213</sup> Ibu Aspingah, Wawancara Anggota BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di Desa Sendang, Tuliskriyo, Kabupaten Blitar), tanggal 19 Mei 2019.

setiap karyawan memungkinkan untuk melakukan semua hal yang berkaitan dengan kepentingan kantor.<sup>214</sup> Sedangkan dalam hal menawarkan produk peran karyawan tentu sangat dibutuhkan, namun dengan terbatasnya sumber daya manusia maka menjadi terbatas pula pergerakan yang dapat dilakukan karyawan untuk memajukan lembaga.

#### **D. Solusi atas Kendala dalam Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar**

##### **1. Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar**

###### **a. Eksternal**

Solusi atas kendala informasi dari pihak rekomendasi kurang akurat, yaitu dilakukan pengetatan aturan baru yang berkaitan dengan anggota sebagai pihak rekomendasi. Pihak KSU Syariah Al Mizan akan lebih fokus kepada anggota-anggota yang sudah terbiasa bertransaksi sehingga sudah terbukti tanggungjawabnya. Selain itu, pihak lembaga juga menghimbau kepada rekomendasi untuk lebih mengesampingkan perasaan-perasaan tidak enak meskipun kepada tetangga ataupun teman sendiri<sup>215</sup>

---

<sup>214</sup> Bapak Hisbulloh Huda, Wawancara *Account Officer* BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di Desa Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar), tanggal 11 Mei 2019.

<sup>215</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara *Manager* KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

Solusi atas kendala rendahnya pengetahuan calon anggota terkait pelaporan hasil usaha yaitu memastikan kejujuran calon anggota sejak sebelum pencairan agar nantinya menyampaikan hasil usaha sesuai kenyataan dan memberikan pengarahan agar usaha yang dijalankan calon anggota berfokus pada satu jenis sehingga pelaporan hasil usaha tidak rumit. Berkaitan dengan pelaporan hasil usaha maka yang berkewajiban dalam hal ini adalah pihak anggota, namun kurangnya pengetahuan anggota memungkinkan dapat merugikan koperasi. Akan tetapi koperasi juga tidak dapat melakukan hal yang lebih terkait permasalahan ini. Akhirnya koperasi hanya dapat mengandalkan kejujuran dari anggota itu sendiri, oleh karena itu KSU Syariah Al Mizan sangat membatasi diri ketika menyalurkan dananya.<sup>216</sup>

b. Internal

Solusi atas kendala kurangnya sumber daya manusia untuk pengawasan yaitu memfokuskan pembiayaan kepada anggota terdekat yang sudah terbukti kejujurannya sehingga tidak membutuhkan pengawasan pihak lembaga secara intens. Dengan adanya kendala ini maka pihak KSU Syariah Al Mizan belum mampu melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha yang dijalankan anggotanya. Akan tetapi terkait dengan hal ini juga tidak ada yang bisa dilakukan

---

<sup>216</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

lebih oleh pihak koperasi, hal yang dapat dilakukan hanya dengan membatasi diri dalam menyalurkan dananya.<sup>217</sup> Langkah seperti ini sudah dirasa cukup bagi pihak KSU Syariah Al Mizan itu sendiri.

## 2. Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

### a. Eksternal

Solusi atas kendala informan yang tidak objektif yaitu melakukan survey dengan lebih dari dua orang dan menentukan kriteria tertentu terkait calon anggota. Selain itu, untuk mencari informasi yang lebih akurat maka survey dilakukan pada perangkat desa.<sup>218</sup> Seorang perangkat desa dianggap mampu memberikan informasi yang objektif. Selain itu, kiranya pihak lembaga sudah memiliki cara tersendiri untuk melakukan survey sehingga terkait informasi tidak benar dari suatu kelompok dapat dihindari.

Solusi atas kendala rendahnya pengetahuan calon anggota terkait akad yaitu pihak lembaga mengenalkan akad menggunakan istilah lain yang mudah dipahami calon anggota. Hal ini dilatarbelakangi karena memang kebanyakan akad berpedoman dari bahasa fiqh maka hal ini sulit diterima oleh masyarakat awam. Intinya

---

<sup>217</sup> Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho, Wawancara Manager KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, (beralamatkan di KSU Syariah Al Mizan Wlingi Blitar), tanggal 01 April 2019.

<sup>218</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

calon anggota bisa tidak paham dengan istilahnya, namun penjelasan terkait sistemnya calon anggota harus paham.<sup>219</sup>

b. Internal

Solusi atas kendala sumber daya manusia masih terbatas yaitu memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Fokus dalam permasalahan ini adalah bagaimana dengan sumber daya manusia yang terbatas akan menghasilkan suatu yang berkualitas. Hal yang dapat dilakukan lembaga yaitu dengan mengkondisikan dimana semua elemen yang ada di lembaga harus kompak menangani segala yang berkaitan dengan lembaga, namun tentu tetap tidak melupakan tugas utamanya.<sup>220</sup> Pada intinya untuk mengatasi sumber daya manusia yang masih kurang ini maka pihak lembaga harus kompak dan solid demi kemajuan lembaga.

---

<sup>219</sup> Bapak Mokh. Ishom, Wawancara Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar), tanggal 09 Mei 2019.

<sup>220</sup> Bapak Hisbulloh Huda, Wawancara *Account Officer* BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, (beralamatkan di Desa Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar), tanggal 11 Mei 2019.